

Draf RUU KUHP Masih Taraf Penyusunan dan Penyempurnaan

JAKARTA (IM) - Draf Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP atau RUKHP) masih dalam tahap penyusunan dan penyempurnaan oleh pemerintah dan DPR. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM, Tubagus Erif Faturrahman menanggapi adanya kritik terhadap draf RUU KUHP yang tidak terbuka ke publik.

“Untuk draf terbaru, kami belum dapat mempublikasikannya karena sifatnya masih dalam taraf penyusunan dan penyempurnaan. Draf baru bisa kami sampaikan apabila pemerintah dan DPR telah bersepakat,” ujar Erif kepada wartawan, Senin (20/6).

“Untuk draf RUU KUHP, yang bisa kami sampaikan kepada publik adalah draf RUU KUHP tahun 2019 yang batal disahkan,” ucapnya.

Pemerintah menyambut baik segala kritik dan masukan yang berkembang terkait RUU KUHP yang sekarang masih dalam tahap perbaikan. Ia memastikan, sosialisasi dan pelibatan publik terus dilakukan pemerintah ke berbagai pihak demi lahirnya RKUHP yang terbaik.

“Dalam rangka penyem-

purnaan draf RUU KUHP tersebut, pemerintah juga terus menerima masukan dari beragam pihak, khususnya elemen sipil,” ucap Erif.

Sebagai informasi, RUU KUHP sudah disepakati di tingkat I tetapi urung dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan akibat penolakan masyarakat yang gencar pada 2019. Kemudian, pada 25 Mei 2022 digelar Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Komisi III DPR.

Saat itu, Kemenkumham yang mewakili pemerintah menyampaikan 14 isu krusial dalam RUU KUHP kepada Komisi III DPR usai pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan dalam dua tahun terakhir.

Komisi III DPR lantas menyetujui 14 isu krusial itu dan akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Keputusan itu membuat langkah selanjutnya dalam pembahasan RUU KUHP adalah tahap Pembicaraan Tingkat II serta penguasaan saat Rapat Paripurna.

Pemerintah dan Komisi III DPR berencana menyelesaikan pembahasan RUU KUHP pada Juli 2022 mendatang. Akan tetapi, sampai saat ini draf terakhir pembahasan RUU KUHP masih misterius. ● me

Rakernas PDIP akan Dibuka Megawati dan Dihadiri Jokowi

JAKARTA (IM) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang kedua tahun 2021 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, mulai Selasa (21/6) hingga Kamis (23/6).

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hastu Kristiyanto mengatakan, Rakernas itu akan dibuka oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader partai.

“Presiden Joko Widodo dijadwalkan memberi sambutan di Rakernas,” kata Hastu dalam keterangannya, Senin (20/6).

Hastu menjelaskan, Rakernas PDI-P kali ini mengusung tema “Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat”. Adapun sub tema Rakernas yaitu “Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara”.

Mengutip pernyataan

Megawati, Hastu mengatakan, Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk memastikan pembangunan desa.

“Bahwa pembangunan Indonesia ke depan, dimulai dari desa,” ujarnya.

Bagi PDI-P, kata Hastu, desa adalah ujung tombak pemerintahan, yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Selain itu desa sekaligus tempat hidup tradisi dan adat istiadat.

“Desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara. Itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa,” katanya.

Lebih jauh, Hastu menilai bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari desa dengan program pembangunan di segala bidang kehidupan.

Sehingga, ke depannya harus ada optimalisasi peran peneliti dan perencana di kampus-kampus yang mengolah sumber daya di desa. ● han



TERA ULANG TIMBANGAN MILIK PEDAGANG
Petugas bidang Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan tera ulang timbangan milik pedagang di Balai Desa Grogol, Kediri, Jawa Timur, Senin (20/6). Tera timbangan yang dilakukan setahun sekali tersebut guna melindungi konsumen agar mendapatkan hasil penimbangan yang sesuai takaran.

2 Polhukam

FOTO: ANT



RAKER EVALUASI MUDIK 2022

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno (kedua kiri), Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (kiri), dan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi (kanan) menyampaikan pemaparan dalam rapat kerja/rapat dengan pendapat bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/6). Rapat tersebut membahas mengenai evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada mudik lebaran tahun 2022.

Enam Provinsi dan 41 Pemda Dukung Percepatan Pembangunan IKN Nusantara

Enam provinsi yang turut menandatangani pakta komitmen mendukung percepatan pembangunan IKN, Sulbar, Kaltim, Kalsel, Kalimantan Utara dan Sulsel.

MAMUJU (IM) - Enam pemerintah provinsi dan 41 kabupaten/kota menandatangani pakta komitmen yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (20/6).

Akmal Malik mengatakan, dalam perspektif kebijakan otonomi daerah, kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah perlu dibangun untuk mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara.

● me

Ini merupakan bentuk inisiatif dan partisipasi dari Pemda di seputar Selat Makassar untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Wujud nyata tahap awal dari dukungan pemerintah daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi mempercepat pembangunan IKN ini adalah dengan penandatanganan pakta komitmen ini,” kata Akmal Malik.

Menurutnya, otonomi daerah harus menghadirkan kebersamaan, kegyuban dan mempererat semangat persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Kolaborasi yang sudah dibangun dalam mendukung IKN Nusantara

adalah salah satu bentuk spirit berotonomi secara nyata. Enam provinsi yang turut menandatangani pakta komitmen mendukung percepatan pembangunan IKN ini, selain Akmal Malik selaku Pj Gubernur Sulbar, yakni Kalimantan Timur yang diwakili Wakil Bupati Paser Syaifuh Nasihat Assegaf, Pemprov Sulsel diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Andi Aslam Patonangi.

Kemudian, Pemrov Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Bappeda Ariadi Noor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kalimantan Utara yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pemprov Sulbar sendiri di bawah kendali Akmal Malik tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk mendukung pembangunan dan operasional kegiatan di kawasan Ibu Kota Negara baru Nusantara. Seperti terus berupaya mendorong hadirnya penerbangan langsung dari Mamuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain itu, sebagai daerah penyangga khususnya dalam hal penyediaan material pembangunan, Akmal Malik mendorong aturan pemberian izin usaha tambang yang cepat tapi tetap memperhatikan aspek lingkungan. Mudah tapi juga mengutamakan kebaikan bagi masyarakat Sulbar secara umum. ● han

Jajaki Koalisi dengan Gerindra, Tapi PKB Tak Relu Jadi Cawapres

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, tidak rela jika Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diusung sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024 mendatang.

“Saya pribadi enggak rela, sebagai Waketum Bidang Pemenangan enggak rela loh,” kata Jazilul di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/6).

“Begini, PKB dalam posisi hari ini tetap, ini kan ada masuk tetap mengunggulkan Pak Muhaimin sebagai calon presiden, gitu aja. Ya kan, kalau PKB kan jelas, PKB selalu memperjuangkan Gus Muhaimin capres, gitu,” ujarnya.

Hal tersebut, kata Jazilul, sesuai dengan mandat muktamar dari jajaran partainya.

“Mandat muktamarnya kan begitu, mandat dari jajaran PKB kan capres,” ucapnya.

Namun, menurut Jazilul, partainya tidak menentang kemungkinan jika ke depannya Cak Imin diusung sebagai cawapres berdasarkan hasil kompromi.

“Nah tetapi karena kompromi ya kita buka opsi-opsi, termasuk dengan Gerindra. Kalau seandainya menerima wapres itu hasil kompromi itu,

maksud saya hasil pembicaraan hasil kompromi,” katanya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sepakat kerja sama pada Pemilu 2024.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara keduanya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6) malam.

Cak Imin dalam pertemuan itu didampingi sejumlah elite PKB di antaranya Jazilul Fawaid, Hasanuddin Wahid, Syaiful Huda, Taufiq Abdulah, dan Lukmanul Khakim. Sedangkan Prabowo didampingi sejumlah elite Gerindra di antaranya Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad.

Komentar PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menentukan arah koalisi dengan partai politik lainnya sebagaimana keputusan musyawarah majelis syuro.

Hal ini menanggapi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan mitra dari PKS dalam Koalisi Semut Merah (KSM) mulai mendekati Partai Gerindra.

PKB disebut-sebut menga-

jak PKS ikut berkoalisi dengan Gerindra.

“Banyak silaturahmi dan pertemuan antara partai belakangan ini menurut saya bagian dari respon setiap partai terhadap dinamika politik yang terus berkembang menuju 2024,” ujar Ketua DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi, dikutip Senin, (20/6).

Menurutnya, pertemuan antara partai politik dimaksudkan untuk mencari kesepakatan dalam menuju Pilpres 2024 dan dianggap sah-sah saja. “Sebagaimana PKS dengan PKB, pertemuan Gerindra dengan PKB menurut saya juga bagian dari penajaksan menuju 2024 serta upaya membangun kesepahaman terhadap problem-problem kebangsaan yang ada,” kata Nabil Ahmad Fauzi.

Oleh karena itu, wajar setiap partai politik saling bersilaturahmi di masa penajaksan sebelum resmi menyatakan koalisi dengan Capres yang akan didukung.

“Jadi ya wajar-wajar saja lah. Pasca Rapimnas PKS pekan depan, kami juga siap berlari menuju 2024, termasuk dengan mengintensifkan komunikasi politik dengan parpol-parpol yang ada,” terang Nabil Ahmad Fauzi. ● me

KPK Periksa Bupati Muna Rusman Emba terkait Kasus Korupsi Dana PEN

JAKARTA (IM) - Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Muhammad Rusman Emba, Senin (20/6).

Rusman Emba tiba di Gedung KPK Jakarta, Senin (20/6) pagi, untuk diperiksa sebagai saksi terkait pengembangan kasus dugaan suap terkait pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN) tahun 2021.

“Sesuai dengan penundaan jadwal pemanggilan sebelumnya, hari ini (20/6) tim penyelidik kembali memanggil saksi La Ode Muhammad Rusman Emba (Bupati Kabupaten Muna),” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (20/6).

Rusman Emba sempat dijadwalkan diperiksa sebagai saksi oleh penyelidik KPK pada Kamis, 16 Juni 2022, namun Rusman tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Penyelidik kemudian mengendagendakan kembali pemeriksaan terhadap Rusman pada Senin (20/6).

Sebagai informasi, KPK saat ini sedang mengembangkan kasus dugaan suap terkait pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN) tahun 2021. KPK telah menetapkan tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan suap terkait pengajuan dana PEN tahun 2021 ini.

KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Baik dari pihak pemberi, maupun penerima suap. Salah satu yang dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yakni, LM Rusdianto Emba. Rusdianto Emba merupakan adik kandung Bupati Muna, Rusman Emba.

Sayangnya, KPK masih belum membeberkan secara detail pihak-pihak yang menjadi tersangka baru dalam pengembangan kasus ini.

KPK berjanji akan mengumumkan secara resmi tersangka baru serta konstruksi lengkap pengembangan perkara ini. KPK bakal transparan dalam penyidikan perkara ini. KPK meminta masyarakat untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

KPK sebelumnya telah

lebih dulu menetapkan tiga penyelenggara negara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan pinjaman dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021. Ketiga pejabat negara itu diduga telah melakukan kongkalikong jahat terkait pengajuan dana PEN.

Adapun, ketiga tersangka tersebut yakni, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), M Ardian Noerianto (MAN); mantan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur (AMN) serta Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar (LMSA).

Dalam perkara ini, Ardian dan Laode Syukur Akbar diduga telah menerima suap terkait pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. Keduanya menerima suap sejumlah Rp2 miliar dari Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur.

Ardian diduga mendapat jatah sekira 131.000 dolar Singapura atau setara dengan Rp1,5 miliar dari total uang suap Rp2 miliar. Sedangkan Syukur Akbar kecipratan uang suap Rp500 juta. Uang suap sebesar Rp2 miliar itu disetorkan Andi Merya Nur ke rekening Syukur Akbar.

Atas penerimaan uang tersebut, Ardian Noerianto kemudian mengupayakan agar permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan Andi Merya Nur disetujui. Alhasil, dana PEN untuk Kolaka Timur disetujui dengan adanya bujukan paraf Ardian pada draft final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan. ● me

PENGUMUMAN

Dengan ini kami memberitahukan telah dilakukan proses likuidasi PT SUMBER SAPUTRA (dalam Likuidasi), berkedudukan di Kabupaten Bogor dengan hasil sebagai berikut:

- Tidak adanya kewajiban pembayaran kepada Pihak Ketiga karena Perseroan sudah tidak mempunyai hutang kepada Pihak Ketiga.
- Menyetujui pembagian sisa kekayaan dari proses likuidasi kepada para pemegang saham Perseroan secara proporsional sesuai dengan perimbangan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bogor, 21 Juni 2022
TTD
Likuidator



PEMERIKSAAN BUPATI MUNA

Bupati Muna La Ode Muhammad Rusman Emba (kanan) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (20/6). Rusman Emba diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN) tahun 2021.

BNI
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini kami mengumumkan kepada para Pemegang Saham PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Kamis, 28 Juli 2022 pukul 10.00 WIB-selesai di Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan bahwa:

- Pemanggilan Rapat beserta acaranya akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada hari Rabu, 6 Juli 2022.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 5 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 dan usulan tersebut diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai alasan atas usulan yang disampaikan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Rabu, 29 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.

Dalam rangka mencegah penularan Covid-19 dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASYS/KSEI) yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat, sejak tanggal penutupan hingga 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022.

Tanah Bumbu, 21 Juni 2022
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
Direksi Perseroan